

## Peran Komunikasi Pembangunan Dalam Mewujudkan *Smart Village* Di Aceh

Taufik

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
taufik.muhammad@ar-raniry.ac.id

**Abstract:** *The development of Information and Communication Technology (ICT) has been pivotal in realizing the concept of Smart Village in Aceh. Smart Village is a development strategy aimed at improving the quality of life in rural communities through the integration of technology to accelerate economic development, enhance public service efficiency, and promote environmental sustainability. Development communication plays a central role in this process, acting as a link between government, communities, and the private sector in implementing innovative solutions. Through collaborative approaches involving government, academia, and industry, and utilizing participatory methods that engage local communities, development communication can raise awareness, enhance skills, and facilitate technology adoption at the village level. However, efforts to achieve Smart Village in Aceh are not without challenges. These challenges include uneven ICT infrastructure, community readiness to adopt new technologies, and cultural differences that can affect program sustainability. Strengthening collaboration among stakeholders and implementing inclusive and sustainable communication strategies, the role of development communication will continue to be crucial in achieving sustainable and equitable Smart Village goals in Aceh.*

**Keywords:** *Online Media; Business; Society*

**Abstrak:** Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi kunci dalam upaya mewujudkan konsep *Smart Village* di Aceh. *Smart Village* merupakan strategi pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui integrasi teknologi untuk mempercepat pembangunan ekonomi, meningkatkan efisiensi layanan publik, dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan. Komunikasi pembangunan memegang peran sentral dalam proses ini, berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengimplementasikan solusi-solusi inovatif. Melalui pendekatan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri, serta dengan memanfaatkan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat lokal, komunikasi pembangunan dapat berperan dalam membangun kesadaran, meningkatkan keterampilan, dan memfasilitasi adopsi teknologi di tingkat desa. Namun, upaya mewujudkan *Smart Village* di Aceh tidak terlepas dari sejumlah hambatan dan tantangan. Hambatan dan tantangan tersebut mencakup kendala infrastruktur TIK yang belum merata, ketidaksiapan masyarakat dalam mengadopsi teknologi baru, serta perbedaan nilai budaya yang dapat mempengaruhi keberlanjutan program. Memperkuat kerjasama antarstakeholder dan melaksanakan strategi komunikasi yang inklusif dan berkelanjutan, maka peran komunikasi pembangunan akan terus berperan penting dalam mencapai tujuan *Smart Village* yang berkelanjutan dan merata di Aceh.

**Kata Kunci:** Media Online; Usaha; Masyarakat

## PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses perubahan sosial yang melibatkan pengenalan ide-ide baru ke dalam suatu sistem sosial dengan tujuan meningkatkan pendapatan per kapita dan kualitas hidup masyarakat. Namun, menurut Cangara, pencapaian tujuan pembangunan akan sulit terealisasi tanpa adanya peran komunikasi yang intensif. Komunikasi berperan penting dalam menyebarkan informasi, mengedukasi masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi aktif dari berbagai pihak. Tanpa komunikasi yang efektif, proses pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar dan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi sulit tercapai.

Komunikasi pembangunan yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memiliki peran yang sangat penting dalam konteks meningkatkan efektivitas dan responsivitas pelayanan publik. Dengan kata lain, kehadiran teknologi sangat diperlukan untuk menopang dan mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor. Windiasih menekankan bahwa TIK memungkinkan pemerintah untuk menyampaikan informasi secara lebih efisien kepada masyarakat, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik. Dalam konteks ini, Dilla menyoroti bahwa kehadiran TIK tidak hanya sekadar sebagai alat bantu, tetapi sebagai pendorong utama dalam percepatan pembangunan di berbagai sektor.

Perkembangan teknologi komunikasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan di berbagai sektor, termasuk pelayanan publik. Menurut laporan United Nations E-Government

Survey 2020, adopsi teknologi digital di sektor publik mampu meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan, bahkan di daerah pedesaan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Putra menunjukkan bahwa di banyak desa di Indonesia, pelayanan publik masih dilakukan secara manual. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan infrastruktur teknologi dan kurangnya pengetahuan serta keterampilan teknologi di kalangan aparatur desa. Penggunaan sistem manual dalam pelayanan publik di tingkat desa sering kali menyebabkan berbagai permasalahan, seperti lambatnya proses administrasi dan kurangnya transparansi. Studi yang dilakukan oleh LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) mengungkapkan bahwa sistem manual kurang efektif dalam menangani kebutuhan masyarakat yang dinamis dan beragam. Hal ini berdampak negatif pada kepuasan warga, sebagaimana diungkapkan dalam penelitian oleh Suyanto yang menemukan bahwa masyarakat di desa-desa dengan layanan manual merasa kurang puas dibandingkan dengan desa-desa yang telah mengadopsi teknologi digital dalam pelayanan publik mereka.

Implementasi teknologi komunikasi di tingkat desa dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. Studi oleh Rahayu menunjukkan bahwa desa-desa yang telah menerapkan teknologi dalam pelayanan publik mengalami peningkatan signifikan dalam efisiensi dan kepuasan masyarakat. Selain itu, adopsi teknologi digital di desa-desa dapat membuka peluang baru untuk memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta memperbaiki manajemen sumber daya alam.

Hal ini sejalan dengan pandangan *World Bank*, yang menggarisbawahi bahwa integrasi TIK dapat mengubah cara desa-desa beroperasi, meningkatkan daya saing ekonomi mereka, dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif.

Pada era digital yang semakin maju, konsep *Smart Village* atau "Desa Cerdas" telah menjadi pivot strategis dalam transformasi pembangunan pedesaan global. *Smart Village* mengadaptasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk merombak lanskap pembangunan, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, percepatan pertumbuhan ekonomi lokal, dan optimalisasi efisiensi layanan publik. Konsep ini tidak sekadar memprioritaskan pembangunan infrastruktur digital, tetapi juga meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Dilandasi pada kenyataan bahwa desa juga menjadi tumpuan pembangunan nasional, dan keberhasilan desa secara akumulatif akan mendorong kelangsungan ekonomi nasional, maka posisi desa sangat penting. Pengembangan desa secara inovatif menuju *Smart Village* adalah cara untuk mewujudkan desa mandiri yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, mempunyai infrastruktur memadai, serta mampu memberikan pelayanan umum dan pemerintahan yang sangat baik. Lebih lanjut, Halim menekankan bahwa *Smart Village* bukan hanya sekadar penerapan teknologi, tetapi juga mencakup pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam proses pembangunan. Desa cerdas adalah desa yang mampu menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan desa, menyediakan pelayanan publik yang

lebih baik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui inovasi dan kreativitas.

Di Aceh, program *Smart Village* telah menjadi fokus perhatian dari pemerintah, terutama dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Aceh terpilih sebagai salah satu lokasi utama untuk menjadi bagian dari program *Smart Village* di Indonesia. Pada tahun 2022, sebanyak 45 desa di Aceh telah terpilih untuk dikembangkan melalui program tersebut. Dari 45 desa yang dipilih, sebanyak 20 desa berlokasi di Kabupaten Bireuen, 15 desa di Aceh Timur, dan 10 desa di Kabupaten Bener Meriah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran komunikasi pembangunan dalam mewujudkan *Smart Village* di Aceh. Fokus utama adalah bagaimana komunikasi dapat digunakan sebagai alat untuk memfasilitasi perubahan sosial, memperkuat partisipasi masyarakat, dan memastikan keberlanjutan program *Smart Village*.

## KAJIAN KONSEPTUAL

### **Komunikasi Pembangunan dan *Smart Village***

Istilah "komunikasi pembangunan" yang diperkenalkan oleh Nora C. Quebral pada tahun 1972 mengacu pada konsep bahwa komunikasi memiliki peran krusial dalam menggerakkan perubahan sosial dan ekonomi. Quebral menekankan bahwa komunikasi pembangunan tidak sekadar sebagai alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memfasilitasi dialog yang membangun pemahaman bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pendekatan ini

memungkinkan untuk memperkuat partisipasi publik, menggalang dukungan untuk program pembangunan, dan meningkatkan efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Komunikasi pembangunan memiliki definisi yang bervariasi sesuai konteks yang dibahas. Dalam pengertian luas, komunikasi pembangunan mencakup peran dan fungsi komunikasi sebagai aktivitas pertukaran pesan yang terjadi secara timbal balik antara masyarakat dan pemerintah. Aktivitas ini mencakup seluruh tahap pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam pembangunan, serta perlunya komunikasi yang efektif untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan dapat tercapai.

Sementara itu, dalam pengertian sempit, komunikasi pembangunan lebih fokus pada upaya, cara, dan teknik penyampaian gagasan serta keterampilan pembangunan dari pihak perintis ide-ide pembangunan kepada masyarakat yang menjadi sasaran. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pendekatan ini lebih berorientasi pada transfer pengetahuan dan keterampilan dari pihak yang memprakarsai pembangunan ke masyarakat luas. Rumusan ini sejalan dengan pendapat Moemeka yang menyatakan bahwa komunikasi pembangunan adalah penggunaan prinsip dan praktik pertukaran ide untuk memenuhi tujuan pembangunan. Dengan kata lain, komunikasi pembangunan tidak hanya sekadar menyampaikan

informasi, tetapi juga melibatkan dialog dan interaksi yang memungkinkan terjadinya pemahaman dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat.

Komunikasi pembangunan memiliki peran yang sangat penting dan sejalan dengan konsep *Smart Village* atau "Desa Cerdas". Konsep *Smart Village* itu sendiri merupakan pengembangan dari konsep *Smart City* yang sudah lebih dahulu dikenal. Namun, konsep *Smart City* yang telah ada tidak bisa diterapkan di desa karena antara kota dan desa memiliki karakter yang berbeda, sehingga kemudian muncul konsep *Smart Village* yang diterapkan di desa. *Smart Village* dapat dikatakan sebagai proses intervensi pemerintah yang dilakukan secara sistematis dan strategis dengan tujuan menciptakan perubahan sosial yang positif dari berbagai aspek, termasuk ekonomi, budaya, politik, dan spiritual. Intervensi ini melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Pemerintah menggunakan komunikasi pembangunan untuk membangun interaksi yang efektif dengan masyarakat di tingkat akar rumput (grassroots). Dengan adanya komunikasi yang efektif, masyarakat dapat lebih memahami dan mendukung program-program *Smart Village*, yang pada gilirannya akan mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan dan inklusif.

Sementara itu, Rogers menjelaskan bahwa komunikasi pembangunan berperan penting dalam memfasilitasi perubahan sosial melalui penyebaran inovasi dan teknologi. Dalam konteks *Smart Village*, komunikasi pembangunan membantu memperkenalkan dan menyebarkan teknologi baru serta

praktik terbaik yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, komunikasi pembangunan juga berfungsi untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan dengan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tujuan dan manfaat dari program *Smart Village*.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menguraikan empat pilar utama dari konsep *Smart Village* yang berbasis teknologi informasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan dan mempercepat pembangunan berkelanjutan, yaitu:

Pertama, *Smart People* yang difokuskan pada pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di desa. *Smart People* adalah program yang menyediakan akses luas terhadap informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Program ini mencakup berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan literasi digital, keterampilan teknis, dan pengetahuan umum. Pilar ini dimaksudkan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan akses informasi, memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan.

Kedua, *Smart Governance*, berfokus pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah desa untuk menerapkan e-governance. *Smart Governance* bertujuan untuk mempermudah pelayanan publik, menyebarkan informasi pembangunan secara transparan dan akuntabel, serta memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka. Selain itu, pilar ini juga ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi

administrasi desa, mempercepat proses layanan publik, dan membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat.

Ketiga, *Smart Economy* yang terdiri dari program-program ekonomi cerdas yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan produktif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. *Smart Economy* mengakselerasi percepatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi dan peningkatan produktivitas. Pilar dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan daya saing produk desa, dan mengurangi kemiskinan melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi yang inovatif dan berbasis teknologi.

Keempat, *Smart Living/Environment* yang mengajak warga desa untuk menciptakan lingkungan yang sehat, asri, bersih, asli, dan rapi (SABAR). *Smart Living/Environment* bertujuan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan desa secara berkelanjutan sehingga dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung kualitas hidup yang baik, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan memastikan keberlanjutan ekosistem desa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur atau library research sebagai pendekatan utama untuk menggali dan menganalisis pendapat-pendapat para ahli mengenai topik yang dibahas. Metode ini difokuskan pada analisis dan sintesis dari berbagai sumber literatur yang relevan seperti buku, artikel jurnal

ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen lainnya.

Metode tinjauan literatur atau *library research* digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang isu yang sedang dipelajari dengan memanfaatkan berbagai sudut pandang dan hasil penelitian sebelumnya. sehingga membantu dalam membangun pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana komunikasi pembangunan berperan dalam implementasi *Smart Village* di Aceh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Komunikasi Pembangunan dalam Mewujudkan *Smart Village***

Komunikasi pembangunan memainkan peran krusial dan multifaset dalam transformasi desa menuju konsep *Smart Village* di Aceh. Konsep *Smart Village* tidak hanya mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan, tetapi juga melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, peran komunikasi pembangunan dalam mewujudkan *Smart Village* dapat diuraikan berdasarkan pendapat beberapa pakar sebagai berikut:

Pertama, sebagai sarana sosialisasi. Komunikasi pembangunan berperan sebagai alat sosialisasi. Menurut Moemeka, komunikasi pembangunan berperan dalam menjaga dan mempertahankan nilai-nilai yang sudah ada dalam masyarakat selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan dan kearifan lokal.

Kedua, sebagai penghubung antar elemen masyarakat. Komunikasi pembangunan berperan sebagai penghubung yang efektif antara berbagai elemen masyarakat, termasuk pemimpin lokal, tokoh masyarakat, dan warga desa lainnya. Melalui komunikasi yang terbuka dan inklusif, informasi mengenai visi, tujuan, dan manfaat dari program *Smart Village* dapat disampaikan dengan lebih baik kepada semua pihak terkait.

Ketiga, sebagai sarana memperkuat partisipasi masyarakat. Komunikasi pembangunan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program *Smart Village*. Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat desa diikutsertakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, yang meningkatkan rasa memiliki dan keberlanjutan proyek tersebut. Penyediaan informasi yang jelas dan transparan memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah berpartisipasi dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program-program pembangunan yang relevan dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari.

Keempat, memfasilitasi transfer pengetahuan dan teknologi. Komunikasi pembangunan juga berfungsi sebagai sarana untuk mengedukasi dan melatih masyarakat tentang penggunaan teknologi baru dan inovasi dalam konteks *Smart Village*. Diseminasi informasi yang efektif mengenai teknologi baru dan praktik terbaik sangat penting untuk mempercepat adopsi inovasi di tingkat desa (Mefalopulos, 2008). Selain itu, melalui kampanye penyuluhan dan pelatihan, masyarakat dapat belajar cara memanfaatkan TIK untuk meningkatkan produktivitas pertanian, mengelola sumber daya air, atau memperluas akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.

Kelima, sebagai pendorong inovasi lokal. Komunikasi pembangunan mendukung munculnya inovasi lokal dengan memfasilitasi pertukaran ide dan praktik terbaik antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Komunikasi yang efektif dapat membuka ruang untuk kolaborasi dan kemitraan yang memungkinkan solusi-solusi lokal yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan unik desa-desa di Aceh.

Secara keseluruhan, komunikasi pembangunan tidak hanya memfasilitasi penyampaian informasi tetapi juga mendorong dialog konstruktif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, yang merupakan elemen kunci dalam keberhasilan program *Smart Village* di Aceh. Selain itu, dalam mewujudkan *Smart Village*, komunikasi pembangunan juga merupakan fondasi yang memungkinkan terciptanya integrasi yang harmonis antara teknologi, masyarakat, dan pemerintah Aceh. Dengan memanfaatkan komunikasi yang efektif, *Smart Village* dapat menjadi model pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan memberdayakan masyarakat secara menyeluruh

### **Peran Aktor Komunikasi Pembangunan dalam Mewujudkan *Smart Village* di Aceh**

Dalam mewujudkan *Smart Village* di Aceh, komunikasi pembangunan melibatkan beberapa komponen pelaku utama yang memiliki peran penting dalam proses transformasi desa menuju ke arah yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Berikut adalah deskripsi singkat tentang komponen-komponen tersebut:

1. Pemerintah. Sebagai inisiator dan pengatur utama dalam implementasi program *Smart Village*, pemerintah daerah

bertanggung jawab untuk merancang kebijakan, mengalokasikan sumber daya, dan memfasilitasi kolaborasi antara berbagai pihak terkait.

2. Akademisi dan Peneliti. Berkontribusi dengan pengetahuan dan riset untuk memahami tantangan lokal, mengembangkan solusi inovatif, dan mendukung pelatihan serta pendidikan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengadopsi teknologi baru.

3. Sektor Swasta. Sebagai penyedia teknologi dan investasi, sektor swasta berperan dalam mendukung infrastruktur TIK, inovasi ekonomi, dan pengembangan kapasitas lokal untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam *Smart Village*.

4. Masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam *Smart Village* sangat penting karena mereka adalah penerima utama manfaat dari program-program ini. Masyarakat perlu terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi program.

Setiap komponen pelaku ini saling terkait dan saling mendukung dalam menciptakan ekosistem *Smart Village* yang inklusif dan berkelanjutan di Aceh. Kolaborasi yang efektif antara semua pihak ini diperlukan untuk mengatasi tantangan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan secara menyeluruh.

## **Upaya Aktor Komunikasi Pembangunan dalam Mewujudkan *Smart Village* di Aceh**

Dalam mewujudkan visi *Smart Village* di Aceh, peran aktor

komunikasi pembangunan menjadi krusial. Tanggung jawab untuk menggalang berbagai upaya strategis yang tidak hanya membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendukung keberlanjutan ekonomi serta lingkungan di tingkat desa. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat lokal, lingkungan yang kondusif bagi adopsi inovasi dan pembangunan berkelanjutan dapat diciptakan. Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan ini adalah sebagai berikut:

## 1. Pemerintah

Berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Aceh untuk mengimplementasikan konsep *Smart Village* di Aceh mencakup beberapa langkah strategis, yaitu:

a. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pemerintah Aceh dapat mengambil langkah untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur TIK di berbagai desa yang menjadi bagian dari program *Smart Village*. Hal ini meliputi pembangunan jaringan internet yang cepat dan stabil, serta penyediaan akses TIK yang merata di seluruh desa.

b. Pelatihan dan Pendidikan TIK. Melakukan pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat desa tentang penggunaan dan manfaat TIK. Hal ini penting untuk meningkatkan literasi digital dan keterampilan teknologi di kalangan penduduk pedesaan, sehingga mereka dapat mengelola dan memanfaatkan teknologi dengan efektif.

c. Pengembangan Ekonomi Berbasis TIK: Mendorong pengembangan usaha ekonomi lokal yang berbasis TIK, seperti e-commerce, pertanian berbasis teknologi, dan industri kreatif digital. Ini dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

d. Pengembangan Program Smart Governance. Implementasi e-governance untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Hal ini termasuk pembangunan sistem administrasi desa yang terintegrasi dengan teknologi untuk efisiensi layanan publik. Penerapan sistem administrasi digital, portal pelayanan online, aplikasi desa pintar untuk komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga, serta penggunaan media sosial bertujuan untuk menyebarkan informasi dan kebijakan.

e. Penggalakan Partisipasi Masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program-program *Smart Village*. Pemerintah Aceh dapat mengadakan forum-forum partisipatif dan konsultasi publik untuk memastikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat terdengar dan dipertimbangkan secara menyeluruh.

Dengan memadukan pelatihan dan pendidikan TIK, pengembangan ekonomi berbasis teknologi, implementasi e-governance, dan penggalakan partisipasi masyarakat, program *Smart Village* di Aceh dapat diwujudkan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

## 2. Akademisi dan Peneliti

Akademisi dan peneliti memiliki peran yang penting dalam

mewujudkan *Smart Village* di Aceh melalui berbagai upaya strategis yang mencakup penelitian, pengembangan teknologi, dan pendidikan masyarakat. Berikut upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh akademisi dan peneliti:

a. Penelitian dan Inovasi. Akademisi perlu melakukan penelitian yang mendalam tentang tantangan dan potensi lokal dalam konteks *Smart Village*. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi solusi-solusi inovatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pedesaan di Aceh.

b. Pengembangan Teknologi Terapan. Akademisi dapat berperan dalam mengembangkan teknologi dan aplikasi TIK yang relevan dan mudah diadopsi oleh masyarakat desa. Ini mencakup pengembangan sistem informasi desa, aplikasi pertanian cerdas, atau platform e-learning untuk pendidikan.

c. Pendidikan dan Pelatihan. Akademisi dan peneliti juga perlu terlibat dalam menyediakan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat desa tentang penggunaan TIK dan manfaatnya. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan literasi digital, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan teknologi secara efektif.

d. Kolaborasi dengan Pemerintah dan Swasta. Pentingnya kolaborasi antara akademisi, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk mengimplementasikan solusi-solusi yang dihasilkan dari penelitian dan inovasi. Ini dapat mencakup pengujian dan skalabilitas teknologi baru serta pengembangan model bisnis yang berkelanjutan.

Melalui kontribusi akademisi dan peneliti, pengembangan teknologi, dan edukasi, akademisi dan penelitian dapat memainkan peran kunci dalam mendukung transformasi menuju *Smart Village* yang inklusif dan berkelanjutan di Aceh.

### 3. Sektor Swasta

Untuk mewujudkan *Smart Village* di Aceh, sektor swasta memiliki peran penting dalam menyediakan teknologi, investasi, dan inovasi yang diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Berikut upaya yang perlu dilakukan oleh pihak sektor swasta:

a. Pengembangan Infrastruktur TIK. Sektor swasta dapat berperan dalam membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memadai di desa-desa Aceh. Hal ini mencakup investasi dalam jaringan internet, penyediaan layanan TIK yang terjangkau, dan pengembangan aplikasi digital yang relevan dengan kebutuhan lokal.

b. Investasi dalam Inovasi Ekonomi. Melalui investasi modal dan teknologi, sektor swasta dapat mendukung pengembangan ekonomi cerdas di desa-desa Aceh. Ini termasuk memfasilitasi startup teknologi, meningkatkan akses pasar bagi produk-produk lokal melalui platform digital, dan memberdayakan pelaku usaha kecil dan menengah.

c. Pelatihan dan Pendidikan TIK. Sektor swasta dapat menginisiasi program pelatihan dan pendidikan tentang teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat desa. Ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital, keterampilan penggunaan teknologi, dan adaptasi terhadap perubahan ekonomi digital.

d. Kolaborasi dengan Pemerintah dan Akademisi. Pentingnya kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah daerah, dan akademisi untuk mengidentifikasi kebutuhan lokal, merancang solusi inovatif, dan mengukur dampak dari program-program pembangunan *Smart Village* yang diinisiasi bersama.

Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, sektor swasta dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan visi *Smart Village* di Aceh, yang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur digital, tetapi juga pada inklusi ekonomi dan sosial masyarakat desa secara luas.

#### 4. Masyarakat

Untuk mewujudkan *Smart Village* di Aceh, masyarakat lokal memegang peran penting dalam berbagai upaya strategis yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di tingkat desa. Upaya yang perlu dilakukan oleh masyarakat lokal adalah sebagai berikut:

a. Partisipasi Aktif dalam Penyusunan Rencana Pembangunan. Masyarakat perlu terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan *Smart Village*. Ini termasuk memberikan masukan, mengidentifikasi kebutuhan lokal, dan menetapkan prioritas pembangunan berdasarkan kondisi dan potensi desa masing-masing.

b. Peningkatan Literasi Digital dan Keterampilan TIK. Masyarakat perlu dilatih dan diberdayakan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Peningkatan literasi digital akan memungkinkan mereka untuk mengakses informasi,

mengelola usaha dengan efisien, dan memanfaatkan layanan publik secara optimal.

c. Pembentukan Kelompok-Kelompok Inisiatif Lokal. Masyarakat dapat membentuk kelompok-kelompok atau komunitas inisiatif lokal yang fokus pada pengembangan ekonomi, pelestarian lingkungan, atau peningkatan kesejahteraan sosial. Kelompok-kelompok ini dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga non-profit untuk mengimplementasikan proyek-proyek yang mendukung visi *Smart Village*.

d. Pengembangan Budaya Partisipatif dan Transparan: Masyarakat perlu mengembangkan budaya partisipatif yang kuat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan. Transparansi dalam pengelolaan dana dan sumber daya serta akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan inisiatif *Smart Village*.

e. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan. Masyarakat lokal harus terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Ini mencakup praktek pertanian yang ramah lingkungan, pengelolaan air yang efisien, dan pelestarian keanekaragaman hayati lokal untuk memastikan bahwa pembangunan *Smart Village* tidak merugikan lingkungan setempat.

Upaya masyarakat lokal ini tidak hanya memperkuat kemandirian dan keberlanjutan desa, tetapi juga memastikan

bahwa implementasi *Smart Village* sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal yang dijunjung tinggi.

## **Hambatan dan Tantangan Komunikasi Pembangunan dalam Mewujudkan *Smart Village* di Aceh**

Penerapan peran komunikasi pembangunan dalam mewujudkan *Smart Village* di Aceh akan menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Tantangan-tantangan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur dan teknologi, hingga aspek sosial dan budaya, antara lain:

1. **Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)** yang masih Terbatas. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan infrastruktur TIK di beberapa daerah pedesaan Aceh. Akses internet yang tidak merata atau kurangnya jaringan yang stabil dapat menghambat implementasi teknologi yang diperlukan untuk mendukung *Smart Village*.

2. **Keterbatasan Literasi Digital.** Tingkat literasi digital yang rendah di kalangan masyarakat pedesaan juga menjadi hambatan serius. Kurangnya pemahaman tentang teknologi modern dapat menghambat efektivitas program-program *Smart Village* yang bergantung pada partisipasi aktif dan pemahaman teknologi oleh masyarakat. Pendidikan dan pelatihan tentang penggunaan TIK menjadi krusial untuk mengatasi tantangan ini.

3. **Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat.** Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan pentingnya pembangunan *Smart Village* menggunakan TIK juga menjadi kendala. Edukasi edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif diperlukan untuk meningkatkan

pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam inisiatif *Smart Village*.

4. Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat. Tantangan lainnya adalah memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan *Smart Village*. Kurangnya pemahaman atau minat terhadap perubahan teknologi dan pembangunan bisa mengurangi efektivitas program yang diimplementasikan.

5. Kesesuaian Teknologi dengan Konteks Lokal. Penggunaan teknologi yang tidak sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat dapat mengurangi efektivitas dan keberlanjutan program *Smart Village*. Perubahan sosial yang dibawa oleh adopsi teknologi baru sering kali menghadapi resistensi dari masyarakat yang terikat pada tradisi dan nilai-nilai lokal. Proses komunikasi yang efektif diperlukan untuk memfasilitasi pengelolaan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat desa.

6. Kondisi Geografis dan Aksesibilitas. Wilayah geografis Aceh yang luas dan kondisi topografi yang beragam dapat menyulitkan pemerataan infrastruktur teknologi dan informasi komunikasi (TIK). Daerah terpencil atau sulit dijangkau seringkali menghadapi tantangan dalam menyediakan akses internet yang memadai.

7. Tantangan Ekonomi dan Keuangan. Implementasi *Smart Village* memerlukan investasi yang signifikan dalam infrastruktur dan pengembangan teknologi. Tantangan ekonomi dan keuangan dapat menjadi hambatan serius bagi pemerintah daerah dan sektor swasta yang berupaya mengimplementasikan proyek-

proyek ini di daerah pedesaan.

8. Kestinambungan dan Keberlanjutan Program. Tantangan lainnya adalah memastikan kesinambungan dan keberlanjutan program *Smart Village* dalam jangka panjang. Hal ini meliputi masalah pembiayaan, pengelolaan program, dan dukungan kontinyu dari berbagai pihak terkait.

Untuk mengatasi hambatan dan tantangan ini diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif dari semua aktor terkait, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Dengan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat, implementasi *Smart Village* di Aceh dapat berhasil meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah diuraikan mengenai peran komunikasi pembangunan dalam mewujudkan *Smart Village* di Aceh, terdapat beberapa poin utama yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komunikasi pembangunan memiliki peran sentral dalam menghubungkan berbagai komponen masyarakat, pemerintah, dan teknologi untuk menciptakan *Smart Village* yang berkelanjutan.
2. Melalui komunikasi pembangunan, masyarakat dapat diberdayakan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

3. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat lokal. Partisipasi aktif masyarakat lokal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi *Smart Village*.
4. Tantangan dan hambatan seperti keterbatasan infrastruktur dan resistensi budaya harus diatasi melalui pendekatan yang inklusif dan partisipatif.
5. Peran akademisi dan peneliti dalam menyediakan penelitian, inovasi, serta evaluasi sangat penting untuk mendukung keberlanjutan dan efektivitas program *Smart Village* di Aceh.
6. Pentingnya memastikan bahwa upaya pembangunan *Smart Village* berkelanjutan dan berdampak positif jangka panjang. Evaluasi secara berkala diperlukan untuk memantau kemajuan, mengidentifikasi masalah, dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cangara, H. (2013). *Komunikasi Pembangunan, Telaah untuk Memahami Konsep, Filosofi, serta Peran Komunikasi terhadap Pembangunan dan Pembangunan Komunikasi dalam Era Digital*. Depok: Rajawali Pers.
- Dewi, L. S., & Putra, M. F. (2019). Challenges of Implementing E-Government in Rural Areas: Case Study in Indonesia. *Journal of Rural Development*, 34(2), 123-135.
- Dilla, Sumadi. (2012). *Komunikasi Pembangunan Pendekatan Terpadu*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Dutta, M. J. (2008). *Communicating Social Change: Structure, Culture, and Agency*. Routledge.
- Halim, Abdul Halim (2021). *Smart Village* Kemendes, Basis Pembangunan Indonesia di Masa Depan. Detik.com, Desember 26, 2021. Diakses pada 31 Oktober 2022. <https://news.detik.com/berita/d-5870797/smart-village-kemendes-basis-pembangunan-indonesia-di-masa-depan>.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). (2022). Program *Smart Village* di Aceh. Diperoleh dari [Kemendesa PDTT - Program *Smart Village*] (<https://www.kemendesa.go.id/smart-village>).
- Kumar Satpathy, S., K. Maharana, R., & Kumar Das, A. (2013). Open source journals of library and information science: a bibliometric study. *Collection Building*, 33(1), 15-20.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (2020). *Empat Pilar Smart Village*. Diperoleh dari LIPI *Smart Village*.
- Mefalopulos, P. (2008). *Development Communication Sourcebook: Broadening the Boundaries of Communication*. Washington, DC: The World Bank.
- Melkote, S. R., & Steeves, H. L. (2001). *Communication for development in the Third World: Theory and Practice for Empowerment*. Sage Publication.
- Moemeka, A. (1991). *Perspectives on Development*

Communication. The African Council for Communication Education.

Quebral, N. C. (1972). Development communication in the agricultural context. In A. W. Smith (Ed.), *Communications and Development: The Passing of the Dominant Paradigm*. (pp. 48-61). Sage Publications.

Rahayu, S. M. (2021). The Impact of Digital Public Services on Village Development. *Journal of Community Development*, 27(3), 215-230.

Rogers, E. M. (2006). *Diffusion of Innovations*. (5th ed.). New York: Free Press.

Rogers, E. M., & Vaughan, P. W. (2003). Interactive Communication: A New Approach to Health Promotion. In T. L. Thompson, A. M. Dorsey, K. I. Miller, & R. Parrott (Eds.), *Handbook of Health Communication*. (pp. 385-409). Lawrence Erlbaum Associates.

Rogers, E. M., dan Shoemaker, F. F. (1971). *Communication of Innovations; A Cross-Cultural Approach*.

SCCIC. (2018). *Smart Village*.  
<http://www.sccic.id/research/smart-village/>

Servaes, J. (2022). Communication for development and social change. In *The Routledge Handbook of Nonprofit Communication* (pp. 23-31). Routledge.

Suyanto, B. (2020). Public Satisfaction with Village Services: Manual vs. Digital Systems. *Indonesian Journal of Public Administration*, 42(1), 45-60.

UNESCO. (2010). *Media and Information Literacy Curriculum for Teachers*. UNESCO Institute for Information Technologies in Education.

United Nations. (2020). *E-Government Survey 2020*. Retrieved from [UN e-Government Survey 2020]

(<https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2020>).

Webster, J., & Watson, R. T. (2002). *Analyzing the past to prepare*

for the future: Writing a literature review. MIS quarterly, xiii-xxiii.

Windiasih, Rili. Komunikasi Pembangunan di Era Digital melalui e-Government dalam Pelayanan Publik dan Pemberdayaan. *Suluh Pembangunan: Journal of Extension and Development*, (2019).

World Bank. (2020). *The Digital Economy for Africa: Strengthening the Foundation*. Retrieved from [World Bank Digital Economy]

(<https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment/publication/the-digital-economy-for-africa>).

Nasution, Z. (2002). *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. PT RajaGrafindo Persada.